**ANALISIS HUKUM TERHADAP TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS
TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. LONDON SUMATERA DI DESA
BONTO MANGIRING KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN
BULUKUMBA**

Oleh :

NUNUNG YULIANI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUSTARING

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Dasar hukum Tuntutan masyarakat atas tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera (Lonsum). 2). Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang di kuasai PT. London Sumatera. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini tehnik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik trigulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Dasar hukum tuntutan masyarakat atas tanah yang di kuasai oleh PT. London Sumatera meliputi: 1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, 2) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, serta 3) adanya Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 17/K/1982/BLK. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang dikuasai oleh PT. London sumatera ialah melakukan musyawarah bersama dengan kepala Desa Bonto Mangiring agar mendapat titik terang penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT. London Sumatera sehingga mendapat suatu kesepakatan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dalil gugatan meminta ganti rugi atas tanah yang dikuasai PT. London Sumatera.

Kata Kunci : Tuntutan Masyarakat, Tanah

ABSTRACT: This study aims to determine: 1). Legal basis Public demand for land controlled by PT. London Sumatera (Lonsum). 2). Efforts made by the community in fighting for land ownership rights controlled by PT. London Sumatera. In this study the authors use qualitative research methods. Data source in this research is primary data source and secondary data. Data collection methods used are interviews and documentation. In this research tehnik examination of the validity of the data used is the technique of stimulation, data analysis techniques conducted with descriptive analysis. The results of this study indicate that 1. Legal basis of community demands on land controlled by PT. London Sumatra includes: 1) Agrarian Basic Law no. Law No. 5/1960 on Basic Regulations on Agrarian Principles, 2) Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning Inauguration, Recognition of Rights and Protection of Indigenous Peoples Ammatoa Kajang, and 3) the Decision of the District Court of Bulukumba Number: 17 / K / 1982 / BLK. 2. Efforts that can be done by the community in fighting for land ownership rights controlled by PT. London Sumatra is conducting a joint consultation with the head of Bonto Mangiring Village to get a bright spot of conflict resolution between the community and PT. London Sumatera so as to get an agreement to file a lawsuit to the District Court of Bulukumba with the argument of lawsuit requesting gantirugi on land controlled by PT. London Sumatra.

Keywords: Community Demands, Land

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset ekonomi yang memiliki nilai tinggi dan merupakan salah satu kebutuhan umat manusia serta merupakan bagian dari aset bangsa Indonesia. Hal ini kemudian menjadi dasar filosofis bagi pengaturan masalah tanah oleh Negara. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa dalam “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Keruwetan masalah pertanahan sering berujung pada sengketa (perselisihan) hukum yang membuat situasi menjadi tidak aman/nyaman bagi pihak yang mengalaminya karena menimbulkan kecemasan akibat “ketidakpastian hukum” atas kepemilikan tanahnya apalagi hukum sering kali tidak dapat memberikan keadilan sebagaimana maksud dari tujuan hukum itu di ciptakan.

Dampak sosial dari konflik pertanahan adalah terjadinya kerenggangan social antara warga negara, warga masyarakat dan hambatan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis di antara mereka. Konflik atas tanah bahkan memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkenaan dengan peran pemerintah dalam memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi rakyat. Di samping, itu selama terjadinya konflik, ruang di atas tanah yang menjadi objek konflik berada dalam keadaan status quo sehingga ruang atas tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan, akibatnya terjadi penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak.

Konflik antara masyarakat dengan PT Lonsum merupakan konflik yang sudah terjadi berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang optimal bagi kedua belah pihak bahkan dalam konflik ini, putusan pengadilan yang seharusnya dapat menjadi instrument penyelesaian konflik justru sebaliknya asemakin menyebabkan besarnya konflik antara kedua belah pihak pada penyelesaian damai pun ternyata tidak memberikan hasil yang signifikan, akibatnya objek konflik menjadi objek yang tidak produktif dan tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sebaliknya menimbulkan korban baik materi maupun non materil bagi kedua belah pihak.

Penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT Lonsum yang sangat lambat dan tidak efektif menunjukkan bahwa penanganan masalah tersebut cenderung lambat dan tidak memiliki metode pendekatan dan strategi yang efektif, efisien dan berkeadilan sehingga upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama ini ternyata tidak dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti mengingat bahwa penyelesaian konflik yang efektif dan efisien akan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi para pihak.

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Tuntutan Masyarakat Atas Tanah Yang Di Kuasai Oleh PT. London Sumatera Di Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.”**

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Pokok Agraria di tetapkan pada tanggal 24 September 1960 oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno dan di undangkan dalam lembaran Negara R.I No.104 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hingga saat ini pada tanggal tersebut di peringati sebagai hari Tani Nasional. Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan Fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang hukum pertanahan. Perubahan tersebut bersifat mendasar atau fundamental karena berubahnya struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari dan isinya dinyatakan UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.

Sebelum UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum Agraria, ada yang bersumber dari hukum Adat “Konsepsi Komunalistik Religius”, Hukum Perdata Barat “Konsepsi Individualistik-Liberal”, dan bekas Pemerintahan Swapraja “Konsepsi Feodal”. Hukum Agraria tersebut di atas hampir seluruhnya terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah jajahan dalam melaksanakan politik Agrariannya, Agrarische Wet 1870.

Dalam hukum Agraria UUPA dimuat tujuan, konsepsi, asas-asas, lembaga hukum, dan garis-garis besar yang memuat ketentuan pokok hukum Agraria Nasional. Tujuan UUPA adalah untuk mewujudkan apa yang di gariskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD N.R.I Tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaanya di

tugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUPA menciptakan hukum agraria nasional berstruktur tunggal, berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian besar rakyat Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang.

Komunitas masyarakat Adat Kajang adalah komunitas adat yang terletak di bagian Timur Kab. Bulukumba, cikal bakal adat masyarakat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunulan To Manurung, Tau Mariolo, manusia pertama di kajang dan menjadi Ammatoa pertama, di masyarakat kajang. Keberadaan masyarakat Adat Kajang sangat terkenal sejak dahulu kala, pada tahun 1931, Abraham Canse, ahli bahasa Kolonial melakukan studi Entografis tentang masyarakat adat kajang dan menemukan fakta bahwa masyarakat adat kajang memiliki keistimewaan dibandingkan masyarakat pada umumnya diantaranya adalah mengenai kepercayaan, budaya, dan gaya hidup mereka, masyarakat adat kajang memiliki filosofis hidup, yakni “Tallasa Kamase-mase” Hidup dalam kesederhanaan.

Cahaya kecil di tengah kegelapan, gagasan pengakuan hukum masyarakat adat kajang di mulai sejak tahun 2008 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dengan menyusun rancangan Perda tentang Penetapan Hutan Adat Kajang, tetap inisiatif ini gagal di tetapkan karena pembahasan yang dilakukan bersama dengan pihak DPRD, mayoritas fraksi berpandangan bahwa

penetapan hutan adat belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

Kemenangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Judicial Review Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan selanjutnya di kenal dengan putusan MK.35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan Negara memberikan semangat baru bagi CSO dan Pemerintah Daerah untuk kembali mendorong lahirnya kebijakan tentang pengakuan hukum bagi masyarakat adat di Kabupaten Bulukumba. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bulukumba ditandai dengan di keluarkannya putusan Bupati Bulukumba nomor 760/VII/2013 tentang pembentukan tim penyusun rancangan peraturan daerah masyarakat adat di Kabupaten Bulukumba.

Tim ini dikepalai oleh kepala dinas Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Adat di Kabupaten Bulukumba. Tim ini di ketuai oleh kepala dinas pariwisata dengan anggota adalah kepala bagaian hukum Setda Kab. Bulukumba, kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kepala BPN, Camat Kajang, AMAN, CIFOR, CIFOR, AGFOR, Balang Institute, dan perwakilan dari masyarakat adat Kajang.

Adapun landasan yuridis yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat di kabupaten Bulukumba ialah Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang

➤ **Masyarakat Adat Dalam Tanah Adat.**

Masyarakat hukum adat mengenal juga adanya hak ulayat, ulayat artinya wilayah, atau tanah yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak

dalam lingkungan wilayahnya. Dalam sebuah buku berbahasa Belanda Terhar Beginnselen En Stelsel Van Het Adatrecht menyebutkan bahwa di Indonesia masing-masing daerah memiliki nama-nama tertentu untuk lingkungan wilayahnya, nama untuk wilayah yang di batasi, di Kalimantan di sebut dengan nama Pewatasan, di Jawa dikenal dengan nama Prabumian, dan di Maluku pada umumnya tanah wilayah biasa disebut dengan nama Petuanan.

Hukum adat tentang tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam UUPA, karena sebagian besar rakyat Indonesia menganut hukum adat sehingga hukum adat menjadi dasar pembentukan hukum tanah nasional. Hukum tanah ialah suatu sistem dari cabang hukum yang mandiri yang mengatur aspek yuridis dari sebuah tanah yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tersebut menjadikan hukum adat menjadi suatu dasar pembentuk. Santoso Urip dalam tulisannya berjudul Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, mengemukakan bahwa Hukum Adat menjadi dasar utama dalam pembentukan Hukum Agraria Nasional dapat disimpulkan dalam Konsideran UUPA yang menyatakan:

“Bahwa berhubung dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsure-unsur yang bersandar pada hukum agama”

➤ **Tuntutan**

Tuntutan dalam hukum acara pidana dapat berupa surat tuntutan atau dalam bahasa lain disebut Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya surat tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka surat tuntutan harus di buat dengan lengkap dan benar.

Apabila analisis hukum sudah dibuat dan semua unsure delik yang didakwakan dapat dibuktikan sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pembuktian di dalam sidang, baru penuntut umum menuntut terdakwa dan berat atau ringannya tuntutan tergantung kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Suatu tindak pidana diancam dengan piadana berat apabila mengandung unsure melawan hukum yang memberatkan pidana, dimana dalam pasal tersebut sudah di tentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan serta jenis barang yang menjadi objek tindak pidana sehingga dinilai memberatkan, maka perlu ancaman pidana yang berat dari tindak pidana yang biasa.

Dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana, penuntut umum juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan, karena itu perlu disampaikan atau di tuliskan dalam surat tuntutan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

➤ **Sengketa Tanah**

Tuntutan Masyarakat atas tanah yang di kuasai PT. London Sumatera bermula sejak jaman penjajahan Belanda ketika salah satu perusahaan Belanda dengan nama *NV. Celebes Landbouw*

Maaschappij yang didirikan pada tahun 1906, kemudian perusahaan perkebunan Belanda tersebut melakukan ekspansi perkebunan ke Kabupaten Bulukumba pada tahun 1919, dan pada tahun 1968 perusahaan perkebunan *NV. Celebes Landbouw Maaschappij* berganti namamenjadi PT London Sumatera (selanjutnya disebut PT. Lonsum). Di awal pembukaan perkebunan PT Lonsum, PT Lonsum mendatangi Desa Bonto Mangiring sekaligus meminta lahan untuk usaha perkebunan dan pembukaan lahan usaha perkebunan. PT Lonsum lalu menguasai dua wilayah, yaitu Ballobassi dan Pallangisang seluas 200 hektar (ha) dengan menanam kopi dan kapuk, dan kini PT. Lonsum menguasai tanah seluas 5.784,46 ha yang ditanami karet.

Priyatna Abdulrasyid mengemukakan bahwa dalam setiap sengketa, salah satu pihak mungkin merupakan pihak yang benar, juga kemungkinan memiliki elemen hak hukum, satu pihak mungkin benar dalam satu masalah dan pihak lain benar dalam masalah lainnya, atau kedua tuntutan pada dasarnya bermanfaat untuk keduanya, atau salah satu pihak mungkin benar secara hukum namun pihak lainnya benar secara moral. Oleh karena itu sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak benar jika ditinjau dari sudut yang berbeda. Sengketa merupakan suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa

Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional atau disingkat dengan BPN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulunya dikenal dengan sebutan *kantor Agraria*. BPN diatur dalam peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2005. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jendral dan Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum di gabung dalam satu lembaga Kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sejak perubahan ini sejak 27 Oktober 2014 Jabatan kepala BPN di jabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan

➤ Tugas dan Fungsi

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas dalam pertanahan, yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan;

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
- Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan
- Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

Landasan Yuridis tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pengkajian Kasus Pertanahan ialah sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan oleh beberapa badan:

- Badan Tata Usaha Negara melalui upaya administratif dan melalui gugatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), upaya administratif ada 2(dua) bentuk, yaitu:

- Upaya Keberatan
- Banding administratif.
- PeradilanTataUsahaNegara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 UUPJTUN yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

➤ Peradilan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Umum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata, Sedangkan alasan menggugat pejabat tata usaha negara didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 BW tentang *onrechtmatige daad* yang memuat unsur-unsur:

- Perbuatan melawan hukum;
- Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;
- Adanya unsur kesalahan.

Gugatan yang didasarkan pada Pasal 1365 BW hanya menyangkut tuntutan ganti kerugian. Hal ini disebabkan bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa besarnya tuntutan ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp 250.000,00 dan paling banyak Rp 5.000.000,00

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian pendekatan kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah

dimana peneliti merupakan instrument kunci. (Sugiyono,2005).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Sosio-Yuridis, yakni penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba lebih khususnya di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 B Bulukumba Jl. Nangka No 2.

Adapun yang menjadi deskripsi fokusnya adalah

- Analisis hukum yang dimaksud adalah tentang Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Perkara Perdata Nomor :17/K/1982/BLK.
- Dasar hukum tuntutan masyarakat atas tanah yang di kuasai PT. London Sumatera.
 - ✓ PT. Lonsum begitu leluasa melakukan pencaplokan serta pengrusakan ratusan rumah dan lahan-lahan pertanian milik petani/masyarakat adat di beberapa Desa di Kabupaten Bulukumba.
 - ✓ Brigjen Kusnadi dan kepala staf kolonel Andi Oddang, merampas tanah rakyat seluas 150 ha di Dusun Balihuko (Desa Bonto Mangiring).
 - ✓ Penggusuran, rumah, sawah, dan kebun di beberapa desa diantaranya Desa Balong, Desa Bonto Biraeng, dan Desa Jojolo.
 - ✓ Adanya perjanjian antara PT. London Sumatera dengan masyarakat Dikatakan dalam perjanjian tersebut PT. Lonsum tidak akan menambah areal atau perluasan perkebunan, namun PT. Lonsum melanggar perjanjian tersebut dan sekarang PT. Lonsum memperluas areal perkebunan lebih dari 1000 ha.
- Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dala

m memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang dikuasai PT. London Sumatera. Salah satu upaya hukum yang telah dilakukan masyarakat adalah meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran ulang ataupun pengambilan batas atas Hak Guna Usaha PT. Lonsum dengan alasan bahwa masyarakat menduga telah terjadi perbedaan luas antara penguasaan dengan luas dalam sertipikat Hak Guna Usaha.

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian.

Tahap Perencanaan

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan adalah:

- Penentuan atau pemilihan masalah
- Latar belakang
- Perumusan masalah
- Tujuan dan manfaat penelitian
- Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- Perumusan metode penelitian

Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan;

- Pengumpulan data
- Pengolahan data
- Analisis data dan
- Penafsiran hasil analisis

Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti: pembaca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan.

Terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- Data Primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian.

- Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literature bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatannya menjadi sistematis dan lebih mudah. Terdapat satu instrumen yang dibuat peneliti, yaitu lembar pedoman wawancara.

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :

- Observasi.

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan oleh penulis dengan memakai instrument pengamatan.

- Wawancara.

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh penulis kepada responden untuk menggali informasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data atau informasi yang diperlukan dengan menggunakan pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang perlu ditanyakan.

- Dokumentasi

Data-data yang didapatkan melalui dokumen, dokumentasi ini berisi data-data yang berbentuk profil, file dan foto untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2012), sebagai berikut:

- **Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

- **Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangannya berbeda-beda.

- **Triangulasi Waktu**

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian

datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Dasar Hukum Tuntutan Masyarakat Atas Tanah Yang Di Kuasai PT. London Sumatera.

Dasar hukum merupakan norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perseorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Berdasarkan hasil wawancara adapun Analisis peneliti bahwa dasar hukum tuntutan masyarakat atas tanah yang di kuasai oleh PT. London Sumatera meliputi: Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, serta Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :17/K/1982/BLK.

Untuk mempertegas data analisis penelitian tentang dasar/alasan sehingga masyarakat menuntut atas tanah yang di kuasai oleh PT. London Sumatera dapat diketahui dari hasil wawancara Ibu Rosmarini Tole, S.T, S.H yang merupakan salah satu perwakilan dari Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana Pengadilan Negeri Bulukumba. Berdasarkan pernyataan Ibu Rosmarini bahwa tanah yang di kuasai PT. London Sumatera merupakan tanah milik masyarakat yang dikuasai selama kurang lebih 28 tahun secara terus

menerus dan turun temurun dengan luas 350 ha.

Selanjutnya Berdasarkan pernyataan Ibu Lenny, S.H bahwa yang masyarakat lakukan dalam menuntut PT. London Sumatera ialah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 April 1982 dengan dalil gugatan meminta ganti rugi atas tanah yang dikuasai PT. Lonsum dengan luas 350 ha. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada analisis peneliti mengenai bukti-bukti yang di perlihatkan masyarakat dalam tuntutan kepada PT. Lonsum bahwa Masyarakat tidak memiliki bukti yang tertulis tetapi masyarakat membuktikan menurut hukum adat yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan bahwa masyarakat telah membuka, mengelolah area lokasi tanah sengketa sebagai tanah garapan, kebun, sawah, dan tempat tinggal mereka secara turun temurun hingga masyarakat patut di pandang telah mempunyai atau memiliki tanah sengketa sebagai hak atas tanah dan/atau sebagai hak pakai atau hak milik menurut Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960.

Berdasarkan hasil analisis peneliti diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki bukti-bukti sebagai hak pakai atau hak milik sesuai dengan hukum adat dan Undang-undang Pokok Agraria No.5/1960 serta adanya Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :17/K/1982/BLK.Menurut pengamatan peneliti adapun undang-undang yang mendasari masyarakat sehingga berhak memiliki tanah yang dikuasai PT. Lonsum ialah undang-undang Pokok

Agraria No.5/1960 mengenai hak milik sesuai dengan pasal 20-27.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Kepemilikan Tanah Yang Di Kuasai PT. London Sumatera.

Upaya hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang di kuasai PT. London Sumatera memutuskan untuk membawa hal tersebut ke pengadilan negeri bulukumba. Analisis peneliti adalah semenjak adanya PT. London Sumatera sebagai penguasa terhadap tanah yang ada di Desa Bonto Mangiring, tentunya akan merugikan masyarakat yang tidak lagi dipekerjakan sebagai buruh perkebunan dan sudah ada tanaman yang sudah ditanami ditebang oleh PT. London Sumatera tanpa adanya ganti rugi. Sementara tanah yang menjadi sengketa oleh PT. London Sumatera merupakan tanah milik masyarakat yang telah di huni/digarap secara terus menerus dan turun temurun selama kurang lebih 28 tahun menurut peraturan daerah no 9.Tahun 2015 pasal 11 bahwa system penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah masyarakat hukum adat

ammatoa kajang ditetapkan berdasarkan pasang.

Berdasarkan analisis peneliti upaya yang dilakukan masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang dikuasai PT. Lonsum ialah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dalil gugatan meminta ganti rugi atas tanah yang dikuasai PT. Lonsum. hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum dimana beberapa masyarakat kehilangan keuntungan yang tidak jadi di peroleh, yakni berupa hasil panen yang diharapkan keuntungan mana tidak dapat dinikmati dan sangat merugikan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Dasar hukum tuntutan masyarakat atas tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera meliputi: 1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 2) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, serta 3) adanya Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :17/K/1982/BLK.
- Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera ialah melakukan musyawarah bersama dengan kepala Desa Bonto Mangiring agar mendapat titik terang penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT. London Sumatera sehingga mendapat suatu kesepakatan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba dengan

dalil gugatan meminta ganti rugi atas tanah yang dikuasai PT. London Sumatera.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran dari penulis, yaitu sebagai berikut:

- PT. London Sumatera semestinya memperhatikan kepentingan masyarakat setempat mengenai perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya karena perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat sehingga masyarakat tidak jadi menikmati keuntungan panen yang diinginkan.
- Seharusnya pemerintah lebih mendukung dan membrikan solusi dengan mengedepankan saling pengertian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang memiliki bukti kepemilikan, tapi bisa membawa kemanfaatan untuk semua. Misalnya PT. London Sumatera memberdayakan masyarakat sebagai petani penggarap diatas tanah konflik dengan catatan tanah tersebut tidak untuk dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Suriyaman Mustari Pide, 2014.*HukumAdatDulu, Kini, dan Akan Datang*; Prenada Media Group; Jakarta
- Bernhard Limbong. 2012. *KonflikPertanahan*; RafiMaju : Jakarta
- Darwain Ginting. *Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia, disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam perspektif Pembaharuan Pertanahan Nasional*, Kamis tanggal 7 November 2011, Hotel Galarry : Bandung

- Erwin Kallo. 2008. *Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti*; Minerva Athena Pressindo; Jakarta
- Maria SW Sumardjono. 2009. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas : Jakarta
- Maria D. Muga. 2010. *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi*. Universitas Diponegoro : Semarang
- Priyatna Abdurasyid . 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*; Fikahati Aneska : Jakarta.
- Rusmadi Murad. 1991. *Hak-hak atas Tanah dan Penyelesaian secara Administrasi dan Hukum*. Makalah yang disampaikan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta tanggal 10 Juli 1991.
- Supriyadi. 2011. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*; Prestasi Pustaka : Jakarta
- Suyud Margono, Op. Cit, h. Dokumen putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Perdata No. 17/K/1982/BLK
- Perda Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2015 Tentang *Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang*
- Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 Tentang *Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertahanan Nasional*
- Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* Presiden Republik Indonesia
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang *Nilai Ganti Rugi*